

Judul : Masih tunggu Surpres, Komisi VIII kebut merevisi UU Haji
Tanggal : Minggu, 10 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Masih Tunggu Surpres

Komisi VIII Kebut Merevisi UU Haji



Marwan Dasopang

KOMISI VIII DPR siap mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah atau UU Haji. Senayan menjamin akan langsung bekerja setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres).

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, revisi UU Haji kini jadi prioritas legislatif. Itu demi

memperkuat koordinasi kelembagaan yang melibatkan Badan Penyelenggara (BP) Haji. Targetnya, beleid anyar ini sudah bisa digunakan mulai musim haji 2026.

"DPR ingin menjamin ada kepastian hukum atas peralihan kewenangan ke BP Haji. Targetnya bisa digunakan untuk 2026," terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Dia menjelaskan, secara operasional BP Haji sudah menjalankan tugas sesuai Peraturan Presiden (Perpres). Namun, struktur dan fungsi BP Haji belum tergambar secara eksplisit dalam undang-undang. Karena itu, percepatan revisi ini menjadi krusial dan tak bisa ditunda lebih lama lagi.

Marwan bilang, mayoritas

anggota Komisi VIII DPR telah memahami substansi penting dalam draf revisi tersebut. Bahkan, banyak poin krusial sudah dibahas saat pengusulan inisiatif DPR beberapa waktu lalu dan diyakini bisa mempercepat tahapan pembahasan di parlemen.

Kendati demikian, sambungnya, DPR tetap membuka ruang partisipasi publik. Komisi VIII berjanji akan melibatkan ormas, pakar, hingga pegiat haji dan umrah dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). "DPR tak ingin regulasi yang dilahirkan hanya menggugurkan kewajiban formal," tegasnya.

Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania menambahkan, proses legislasi masih berlangsung, sambil menunggu DIM dari Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan bersama. Artinya, jadwal pengesahan belum bisa dipastikan meskipun targetnya ambisius. "Revisi UU Haji saat ini sudah memasuki Tahap II di Badan Legislatif DPR," ungkap Dini.

Menurutnya, status revisi ini sudah sah sebagai usul inisiatif DPR yang disetujui dalam

paripurna ke-25 masa sidang IV tahun 2024-2025. Namun, karena pembahasan dilakukan bersama Pemerintah, dokumen resmi dari eksekutif sangat menentukan progresnya. DIM menjadi kunci agar pembahasan bisa segera dimulai.

DPR menyadari, tata kelola ibadah haji memerlukan aturan yang adaptif dengan dinamika umat dan struktur birokrasi. Terlebih, pasca pembentukan BP Haji, koordinasi lintas kementerian dan lembaga perlu diatur lebih rinci.

Komisi VIII DPR ingin memastikan peran negara dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak melemah, justru makin solid. "Jadi belum bisa dikatakan akan disahkan dalam waktu dekat, karena proses legislasi masih berlangsung," ujar politikus Partai NasDem itu. ■ PYB